

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana salah satu negara berkembang, Republik Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegalabidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur undang-undang. Hal ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan Otonomi Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dipandang sebagai mitra kerja yang terkait karena konsensus yang disepakati bersama dan diakui oleh masyarakatnya. Otonomi Daerah merupakan amanat rakyat yang diharapkan menjadi persyaratan bagi terciptanya upaya pembangunan yang adil, demokratis dan mengikutsertakan peran serta aktif masyarakat disegalatingkat dan dalam segala aspek

Prinsip – prinsip yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen mengatur tentang prinsip-prinsip otonomi daerah, diantaranya adalah prinsip mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya, prinsip kekhususan dan keragaman daerah, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, prinsip mengakui dan menghormati Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan istimewa, prinsip badan perwakilan dipilih langsung oleh suatu pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dahlan Tholib menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam dan di luar negeri, serta tantangan persaingan global dipandang perlu pelaksanaan otonomi daerah memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan menurut Bagir

Manan,

Otonomi merupakan salah satu hal yang penting bagi suksesnya penyelenggaraan Pemerintahan

Negara. Otonomi Daerah jugamerupakandasaruntukmemperluaspelaksanaandemokrasidan instrument mewujudkankesejahteraanumum.

Otonomi Daerah yang bertujuankepadakemandiriandanpembangunandaerahberdasarkanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah telahdiselenggarakan di Kota LubukSikaping. Berkaitandenganhaltersebut, makaPemerintah Kota LubukSikapingmembentukBadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) agar dapatmembantuPemerintah Daerah dalammerencanakan Pembangunan di Kota LubukSikaping. Keberhasilanpembangunandaerahtidaklepasdari proses perencanaan yang berupapenentuankebijaksanaan program-program pembangunan, yang dalampelaksanaankebijakandan program-program tersebutdikendalikanoleh BAPPEDA. TentunyadengandikeluarkannyaUndang – UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahanDerahmembawakonsekuensi yang baruterhadapkedudukan, peran, tugasdanfungsi BAPPEDA sebagaiBadanPerencanaan Pembangunan di Kota LubukSikaping.

Berkaitandenganpermasalahan di atas, penulistertarikuntukmelakukanpenelitiandenganjudul “PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA LUBUK SIKAPING”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkanlatarbelakangmasalahtersebut di atas, makapenulisdapatmerumuskanbeberapamasalahsebagaiberikut :

- 1) Bagaimana peranan BAPPEDA Kota Lubuk Sikaping dalam Perencanaan Pembangunan?
- 2) Bagaimana tugas dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuk Sikaping?
- 3) Bagaimana pelaksanaan tugas Bappeda Kota Lubuk Sikaping dalam perencanaan pembangunan Kota Lubuk Sikaping?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui peran BAPPEDA Kota Lubuk Sikaping dalam Perencanaan Pembangunan.
- 2) Untuk mengetahui tugas dan wewenang BAPPEDA Kota Lubuk Sikaping.
- 3) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Bappeda Kota Lubuk Sikaping dalam perencanaan pembangunan

1.4 MANFAAT PENULISAN

Manfaat dari penulisan laporan adalah :

1. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang barubagipenulismengenaitugasdanwewenang BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kota Lubuk Sikaping.
2. Merupakan kesempatan yang sangat berharga bagipenulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkannya selama kuliah di jurusan Keuangan Negara Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

1.5 METODE PENULISAN

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi dan memperoleh data pada penulisan makalah ini adalah :

a. Metode pengumpulan data

1. Studi Kepustakaan

Dengan cara pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mendapatkan dari buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah.

2. Studi Lapangan

Mengumpulkan data secara langsung yang diperoleh dari kantor BAPPEDA Kota Lubuk Sikaping.

b. Metode analisa data

Ada dua macam metode yang digunakan yaitu :

1. Metode Kualitatif

Dalam analisis ini akan digunakan teori-teori yang ada dalam literatur dengan masalah yang dibahas.

2. Metode Kuantitatif

Dalam analisis ini akan digunakan analisis regresi dan korelasi untuk dapat melihat pengaruh serta hubungan yang ada di dalam permasalahan.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang dilakukan yaitu secara bertahap atau sistematis atas lima bab, yaitu :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan penilaian judul, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisikan tentang pengertian Bappeda, tugas pokok dan fungsi Bappeda, pengertian Perencanaan, pendekatan dalam pembangunan, tujuan perencanaan, manfaat perencanaan, langkah-langkah dan syarat perencanaan, ruang lingkup perencanaan, unsur pokok perencanaan pembangunan, proses dan siklus perencanaan pembangunan.

BAB III merupakan gambaran umum tentang BAPPEDA, yang berisikan tentang pengertian BAPPEDA, sejarah berdirinya BAPPEDA, visi dan misi BAPPEDA, serta struktur organisasi BAPPEDA Kota Lubuk Sikaping.

BAB IV merupakan pembahasan yang berisikan tentang tugas Bappeda dalam perencanaan pembangunan, wewenang Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kota Lubuk Sikaping dan peran serta Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kota Lubuk Sikaping.

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta keterbatasan penelitian.



